



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jambu Karang No. 2 Purbalingga ✉ 53311 Jawa Tengah
☎ (0281) 893117 Fax. (0281) 893117
Email: kesbangpol@purbalinggakab.go.id

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
TAHUN 2023**

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2024

KATA PENGANTAR

Dalam pelaksanaan ketatapemerintahan, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Kinerja Instansi Pemerintah, dimana di dalam Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Berdasarkan hal tersebut, disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga guna mendukung penerapan tata pemerintahan yang baik berazas akuntabilitas demi mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi Satuan Kerja yang dapat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dalam Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam negeri secara baik dan benar, serta akuntabel. Selain itu laporan ini diharapkan mampu menjadi masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga sehingga dapat memelihara kepercayaan masyarakat di Kabupaten Purbalingga terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Purbalingga.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dihaturkan kepada semua pihak yang turut berperan serta secara aktif dalam menyusun dan memberikan masukan terhadap Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2023, termasuk diantaranya narasumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga, seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga, dan tim penyusun

Laporan Kinerja Instansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga serta pihak-pihak lainnya yang terkait.

Purbalingga, 26 Januari 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURBALINGGA



PANDI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19690717 199101 1 003

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Purbalingga government. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA' around the top edge and 'BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK' in the center. A blue ink signature is written over the stamp. Below the stamp, the name 'PANDI, S.Sos' is printed in bold, followed by the title 'Pembina Utama Muda' and the NIP number '19690717 199101 1 003'.

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Bab I	Pendahuluan
1.1	Latar Belakang 1
1.2	Gambaran Umum 3
1.2.1	Tugas dan Fungsi 6
1.2.2	Struktur Organisasi 7
1.2.3	SDM Perangkat Daerah 8
1.3	Sistematika Laporan 9
Bab II	PERENCANAAN KINERJA
Bab III	AKUNTABILITAS KINERJA
3.1	Capaian Kinerja Perangkat Daerah 17
3.2	Realisasi Anggaran 42
Bab IV	PENUTUP 57

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga	3
Tabel 1.2	Komposisi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga berdasarkan pendidikan formal	9
Tabel 1.3	Komposisi pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga berdasarkan pangkat/golongan	9
Tabel 1.4	Komposisi pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga berdasarkan eselon	9
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2023	11
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12
Tabel 2.3	Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2023	14
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja Bermakna Positif	18
Tabel 3.2	Skala Nilai Peringkat Kinerja Bermakna Negatif	18
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2023	19
Tabel 3.4	Realisasi Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga	22
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Tujuan	23
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Sasaran	25
Tabel 3.7	Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kelembagaan Kesbangpol	26
Tabel 3.8	Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Potensi Konflik di Masyarakat	28
Tabel 3.9	Potensi Konflik yang dilaporkan	29
Tabel 3.10	Menurunnya Angka Konflik Sosial	31
Tabel 3.11	Rekapitulasi Kejadian Konflik Tahun 2023	32
Tabel 3.12	Capaian Kinerja Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Bidang Politik Dalam Negeri	36
Tabel 3.13	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2023	42
Tabel 3.14	Capaian Kinerja Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2023	46
Tabel 3.15	Data Efisiensi Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2023	46
Tabel 3.16	Data Analisis atas Efektifitas Penggunaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2023	47
Tabel 3.17	Matriks Tindak Lanjut Evaluasi Akip Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Purbalingga	52
Tabel 4.1	Capaian per Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2023	57



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaporan merupakan salah satu fase penting yang tidak dapat dipisahkan dalam siklus manajemen. Dalam pelaksanaan pemerintahan, pelaporan disamping merupakan wujud tertulis pertanggung jawaban suatu instansi kepada pemberi wewenang dan mandat, juga sebagai umpan balik peningkatan kinerja instansi itu sendiri.

Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwasanya setiap pimpinan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) SKPD. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 merupakan wujud tertulis pertanggungjawaban pencapaian kinerja SKPD kepada Bupati Purbalingga terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD selama Tahun 2023.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (Good Governance) di Indonesia sebagaimana telah diamanahkan oleh rakyat melalui Tap MPR Nomor IX Tahun 1998.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga ini, diharapkan dapat bermanfaat untuk:

- a. Mendorong Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk dapat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dalam Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam negeri secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijaksanaan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Menjadikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.



- c. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga.
- d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Kabupaten Purbalingga terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Purbalingga.

1.2. LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 disusun berdasarkan pada:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Pelaksanaan Reviu atas Penetapan Kinerja;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109);
8. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 127 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tatap Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Purbalingga;



9. Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor 060/5 tentang Pedoman Implementasi Sistem Auntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemkab Purbalingga tanggal 14 Desember 2023.

1.3. Gambaran Umum

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga merupakan perangkat daerah yang membantu kepala daerah dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Menghadapi *Isu Strategis* berupa **Potensi Konflik Sosial** dan **Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu**. Isu strategis ini didasarkan pada permasalahan yang ada meliputi :

Tabel 1.1.
Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Purbalingga

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Masih Rendahnya Pemahaman Masyarakat Dalam Menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kesatuan bangsa	Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme Masih adanya potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum berupa aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi Masifnya arus masuk budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan Pancasila yang berdampak pada adanya dekadensi moral dan budaya di masyarakat. Menurunnya tingkat moderasi dan toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama/penghayat kepercayaan



			<p>Kurangnya pemahaman masyarakat tentang demokratisasi, penegakan hukum dan HAM yang berpotensi terjadinya konflik dan disintegrasi sosial</p> <p>Berkurangnya ketahanan ekonomi masyarakat, yang bisa menimbulkan kerawanan sosial dan konflik di masyarakat.</p>
		Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap politik	<p>Belum optimalnya peran partai politik dalam proses penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi</p> <p>Belum optimalnya pemahaman tentang etika dan budaya politik demokratis</p> <p>Belum optimalnya tingkat partisipasi politik masyarakat dibanding nasional.</p> <p>Masih terjadinya money politik dalam pelaksanaan pemilu</p>
2.	Penatausahaan administrasi yang belum optimal	Lemahnya tingkat pemahaman penatausahaan dan administrasi	<p>Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sumber daya manusia di kantor kesatuan bangsa dan politik baik secara kuantitas maupun kualitas</p> <p>Rendahnya pemahaman tentang peraturan sistim dan prosedur penata usahaan dan administrasi..</p> <p>Belum optimalnya pelaksanaan tugas-tugas internal. hal ini disebabkan belum memenuhi standar operasional prosedur kerja.</p> <p>Terbatasnya sarana dan prasarana yang ideal dalam menunjang aktivitas pekerjaan. hal tersebut akan berdampak kepada kecepatan penyelesaian tugas</p>

Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Purbalingga, isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga adalah

- a. **Masih kurangnya kepedulian sebagian masyarakat terhadap fenomena/peristiwa/kejadian di masyarakat dalam rangka kewaspadaan dini dan cegah dini.**

Harus disadari bersama bahwasanya dalam menghadapi segala kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG)



yang dapat mengganggu kondusifitas daerah dan ketentraman masyarakat tidak bisa melulu menyandarkan pada aparat pemerintah/negara, tapi memerlukan peran aktif seluruh komponen masyarakat. Terkait hal tersebut, dirasa masih kurang kepedulian sebagian masyarakat terhadap fenomena/peristiwa/kejadian di masyarakat dalam rangka kewaspadaan dini dan cegah dini, untuk turut aktif berpartisipasi mengantisipasi timbulnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) tersebut.

- b. Adanya pihak-pihak tertentu yang berupaya merusak kerukunan hidup di masyarakat dan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.** Perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesat dan bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dapat meninggalkan kesan mendalam yang mampu mempengaruhi pola pikir, tindakan dan perilaku masyarakat.

Adanya pihak-pihak tertentu yang berupaya merusak kerukunan hidup di masyarakat dan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa dengan memanfaatkan teknologi informasi tersebut melalui konten negative yang bersifat *hoax* dan berbau propaganda, *hate speech* atau ujaran kebencian serta menggunakan berbagai cara lainnya dalam usahanya tersebut.

- c. Masih kurangnya kesadaran sebagian masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan demokrasi sesuai ketentuan yang berlaku.** Masih sering terdengar berita "*money politic*", dalam setiap hajatan politik dan penyampaian aspirasi, ataupun tingginya angka golput yang berarti kurang dewasanya sebagian masyarakat dalam berdemokrasi serta kurangnya kesadaran sebagian masyarakat untuk berpartisipasi/menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu. Hal ini dapat mengganggu stabilitas politik yang pada akhirnya dapat merusak kondusifitas di masyarakat.
- d. Masih kurangnya kesadaran sebagian masyarakat (utamanya generasi muda) terhadap bahaya narkoba.**

Meningkatnya ancaman bahaya narkoba yang ditandai dengan makin maraknya kasus narkoba yang bahkan sudah menyasar lingkungan sekolah dan pedesaan perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang intens. Penyalahgunaan narkoba menjadi ancaman serius karena dapat merusak moral masyarakat, bahkan



berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketentraman di masyarakat.

1.2.1. Tugas dan Fungsi

Mengacu pada Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 127 Tahun 2022 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PURBALINGGA, khususnya ketentuan pada **Pasal 2 Ayat (1)** BAKESBANGPOL merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Daerah.

Sebagai Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga mempunyai tugas pokok yaitu

membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Sedangkan dari fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga mempunyai fungsi yaitu :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

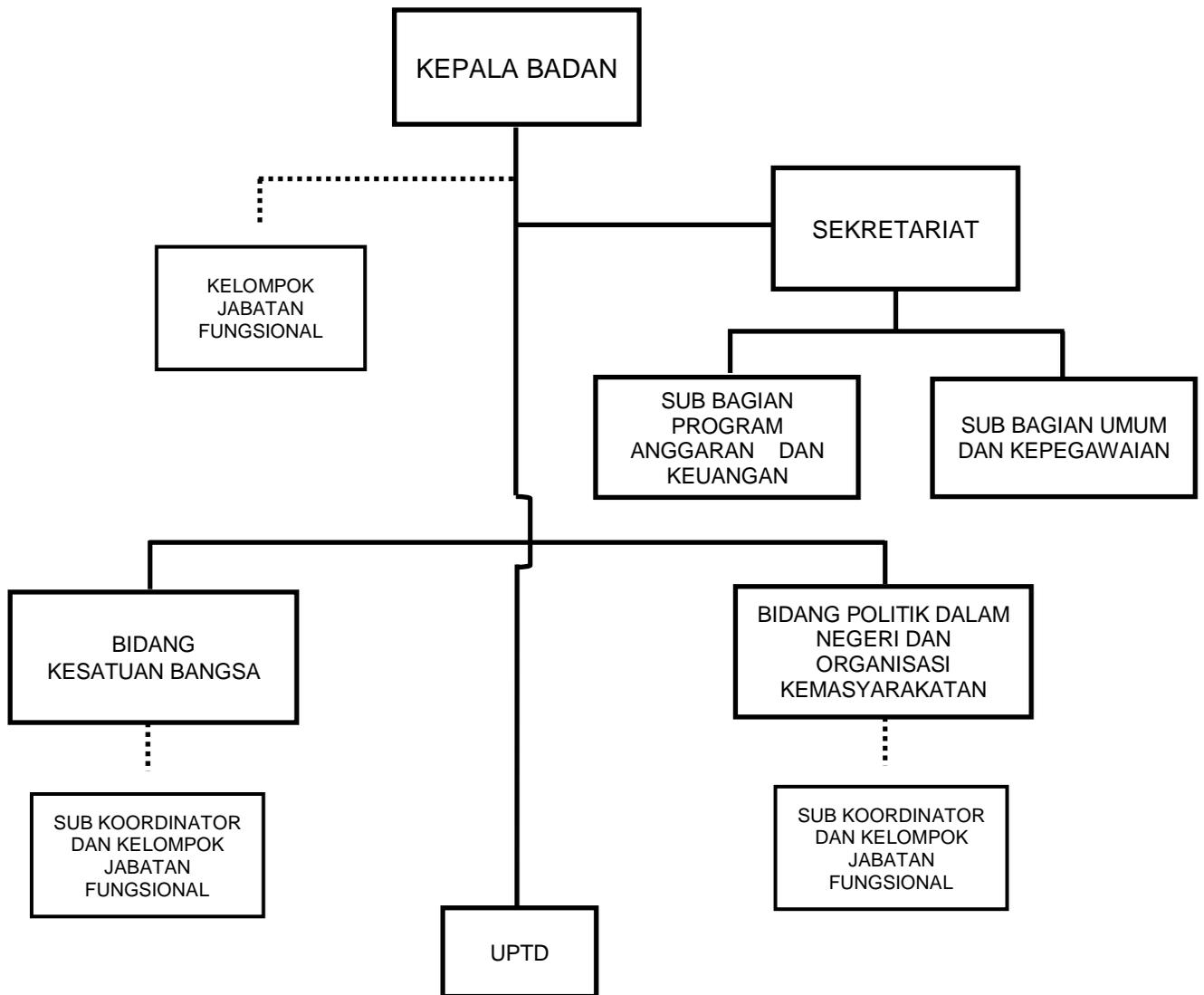


- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah;
- f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan BAKESBANGPOL;
- g. pengendalian penyelenggaraan UPTD; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Memperhatikan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga menangani tugas-tugas di bidang pengembangan wawasan kebangsaan, fasilitasi politik dan pendidikan politik masyarakat, peningkatan kewaspadaan terhadap ancaman/gangguan yang dapat mengganggu stabilitas nasional di daerah melalui deteksi dini dan cegah dini, kerjasama terpadu dengan aparat keamanan, instansi terkait serta komponen masyarakat lainnya dalam penanganan konflik sosial baik pra, tanggap darurat maupun pasca.

1.2.2. Struktur Organisasi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga dilengkapi dengan struktur organisasi sebagai berikut :



1.2.3. SDM Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga pada tahun 2023 memiliki pegawai sebanyak **20 orang** dengan komposisi sebagai berikut :



Tabel 1.2

Komposisi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga berdasarkan pendidikan formal

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai	Pendidikan Formal				
			S2	S1	D3	SLTA	SLTP
1	Kepala Badan	1		1			
2	Sekretaris	1	1				
3	Kepala Bidang	2		2			
4	Kepala Sub Bagian	2		2			
5	Pelaksana	6		2	1	3	
6	THL	9		4		4	1
Jumlah		21	1	11	1	7	1

Tabel 1.3

Komposisi pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga berdasarkan pangkat/golongan

No	Unit Kerja	Pangkat/Golongan			
		IV	III	II	I
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga	3	6	2	
Jumlah		3	6	2	

Tabel 1.4

Komposisi pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga berdasarkan eselon

No	Unit Kerja	Eselon			
		IV	III	II	I
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga.	2	3	1	
Jumlah		2	3	1	



1.4 Sistematika Laporan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 terdiri dari 4 (empat) bagian yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV PENUTUP



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Badan. Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan/ kesepakatan/ perjanjian kinerja untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Purbalingga sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Purbalingga nomor 060/293 tanggal 11 September 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dan Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Purbalingga melakukan Perubahan IKU yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

BADAN KESBANGPOL KABUPATEN PURBALINGGA

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2023
Meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai wawasan kebangsaan, dan partisipasi politik Masyarakat		Persentase potensi konflik yang diredam tidak menjadi konflik	Persen	95
	Meningkatnya implementasi SAKIP KESBANGPOL	Nilai SAKIP	Indeks	72
	Menurunnya potensi konflik dimasyarakat	Cakupan pencegahan/tangkal dini konflik	Rasio	31,9



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TAR GET 2023
Meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai wawasan kebangsaan, dan partisipasi politik Masyarakat		Persentase potensi konflik yang diredam tidak menjadi konflik	Persen	95
	Meningkatnya implementasi SAKIP KESBANGPOL	Nilai SAKIP	Indeks	72
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang politik dalam negeri	Cakupan pendidikan politik Masyarakat	Persen	0,28
		Cakupan pendidikan wawasan kebangsaan	Persen	0,16

Perubahan IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Purbalingga

TUJUAN	SASARAN	IKU OPD	IKU PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN IKU	Formulasi	Satuan
Meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai wawasan kebangsaan dan partisipasi politik masyarakat		Persentase potensi konflik yang diredam tidak menjadi konflik	Persentase potensi konflik yang diredam tidak menjadi konflik		(Jumlah potensi konflik yang diredam tidak menjadi konflik/ Jumlah potensi konflik) x 100	Persen
	Meningkatkan kualitas kelembagaan KESBANGPOL	Nilai SAKIP KESBANGPOL	Nilai SAKIP KESBANGPOL		Release Inspektorat	Indeks



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
 Tahun 2023

	Menurunnya potensi konflik dimasyarakat	Jumlah potensi konflik yang dilaporkan	Cakupan pencegahan/tangkal dini konflik	Perubahan IKU dari Jumlah Potensi Konflik yang dilaporkan menjadi Cakupan Pencegahan/Tangkal Dini Konflik guna mendukung Persentase Potensi Konflik yang diredam tidak menjadi konflik, tidak hanya menghitung jumlah potensi konflik saja, tetapi berikut upaya yang dilakukan Bakesbangpol guna mencegah potensi konflik berkembang menjadi konflik. Indikator ini dipilih guna mendeteksi konflik yang muncul di masyarakat serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang toleransi bermasyarakat	Jumlah potensi konflik yang dilaporkan	Potensi
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang politik dalam negeri	Persentase pemilih yang menggunakan hak pilih dalam Pemilu (presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kota)		Persentase pemilih yang menggunakan hak pilih dalam Pemilu (presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kota) hanya dapat dihitung 5 (lima) tahun sekali yaitu pada saat penyelenggaraan pemilu, sehingga dalam penetapan target kinerja tahunan di luar tahun penyelenggaraan pemilu menjadi tidak rasional, target 0 realisasi 0, namun capaian kinerja 100%	(Jumlah Pemilih yang hadir/Jumlah DPT) x 100	Persen
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang politik dalam negeri		Cakupan pendidikan politik masyarakat	Alasan pemilihan IKU ini guna memberikan pendidikan politik kepada masyarakat terutama kepada pemilih pemula yang baru memiliki hak pilih baik pada pemilu, pilpres, pileg maupun pilkada. Indikator ini dapat mengakomodir penetapan target dan capaian kinerja per tahun.	(Jumlah masyarakat usia 16-17 tahun yang memperoleh Pendidikan Politik /Jumlah penduduk usia 16-17 tahun) x 100	Persen



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
 Tahun 2023

			Cakupan pendidikan wawasan kebangsaan	Indikator ini dipilih guna memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang cinta kepada tanah air sebagai negara yang mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat	(Jumlah penduduk usia produktif yang menerima pendidikan wawasan kebangsaan/Jumlah penduduk produktif) x 100	Persen
--	--	--	---------------------------------------	---	--	--------

Dalam rangka mewujudkan perjanjian kinerja tahun 2023, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan 6 Program, 13 Kegiatan dan 37 sub kegiatan yang didukung anggaran sebesar Rp. 23.636.791.000,00 dengan rincian setiap program sebagai berikut:

Tabel 2.3
 Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga
 Tahun 2023

NO.	URAIAN	Target	Alokasi Anggaran	Sumber Dana
1	2		3	5
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		23.636.791.000	DAU
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.575.322.000	DAU
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	3.992.000	DAU
	1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	2.332.000	DAU
	1.1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dokumen	1.660.000	DAU
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	1.964.820.000	DAU
	1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13 orang	1.858.303.000	DAU
	1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	75.458.000	DAU
	1.2.3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	350 dokumen	31.059.000	DAU
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 persen	3.320.000	DAU
	1.3.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	3.320.000	DAU
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	6.587.000	DAU
	1.4.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4 orang	6.587.000	DAU
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	67.418.000	DAU
	1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	1.200.000	DAU
	1.5.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	48.670.000	DAU
	1.5.3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	1.200.000	DAU
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 bulan	9.000.000	DAU



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
 Tahun 2023

	1.5.4				
	1.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	3.660.000	DAU
	1.5.6	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 bulan	3.688.000	DAU
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 persen	35.000.000	DAU
	1.6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41 unit	35.000.000	DAU
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen	271.026.000	DAU
	1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		537.000	DAU
	1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	61.320.000	DAU
	1.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	9.000.000	DAU
	1.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	200.169.000	DAU
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen	223.159.000	DAU
	1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14 unit	159.009.000	DAU
	1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30 unit	9.150.000	DAU
	1.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	55.000.000	DAU
2	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			555.928.000	DAU
	2.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	31,9 per 10000 penduduk	555.928.000	DAU
	2.1.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	12 dokumen	26.976.000	DAU
	2.1.2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	102 orang	526.877.000	DAU
	2.1.3	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan	12 laporan	2.075.000	DAU
3	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik			18.318.266.000	DAU
	3.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	31,9 per 10000 penduduk	18.318.266.000	DAU
	3.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1000 orang	18.293.191.000	DAU
	3.1.2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1000 orang	23.000.000	DAU
	3.1.3	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 laporan	2.075.000	DAU
4	PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat			824.745.000	DAU
	4.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	23,95 persen	824.745.000	DAU
	4.1.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12 dokumen	226.475.000	DAU
	4.1.2	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Pelaksanaan	1000 orang	591.770.000	DAU



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
 Tahun 2023

	4.1.3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12 laporan	6.500.000	DAU
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			150.809.000	DAU
	5.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	31,9 per 10000 penduduk	150.809.000	DAU
	5.1.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	12 dokumen	25.524.000	DAU
	5.1.2	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	900 orang	123.210.000	DAU
	5.1.3	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	12 laporan	2.075.000	DAU
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				DAU
	6.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	45 potensi konflik	1.211.721.000	DAU
	6.1.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 dokumen	434.014.000	DAU
	6.1.2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2880 orang	419.998.000	DAU
	6.1.3	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 laporan	59.427.000	DAU
	6.1.4	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 laporan	298.282.000	DAU



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa & Politik Tahun 2023

Capaian kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan *sasaran* dan *tujuan* organisasi yang tertuang dalam *rencana strategis* organisasi. *Capaian kinerja* dapat diketahui dari *pengukuran kinerja*, yaitu proses dimana organisasi menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh program yang telah dilaksanakan.

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga. Pengukuran yang dimaksud merupakan suatu hasil dari suatu penilaian (Assesment) yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak.

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta rewiu dan evaluasi kinerja berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Penghitungan capaian kinerja



kegiatan sebagaimana mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Terdapat dua jenis skala penilaian pengukuran :

1.4.1.1 Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, maka skala yang digunakan sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja Positif

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51 % ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

b. Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negatif, maka skala yang digunakan sebagai berikut :

Tabel 3.2

Skala Nilai Peringkat Kinerja Negatif

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat Rendah
2.	76% ≤ 90%	Rendah
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51 % ≤ 65%	Tinggi
5.	≤ 50%	Sangat Tinggi



Berikut ini diuraikan *Capaian Kinerja* Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2023.

a. Realisasi Indikator Kinerja Utama

Pada tahun 2023, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026. Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Pencapaian Indikator Kinerja Utama tahun 2023 secara ringkas ditunjukkan sebagai berikut :

Tabel 3.3

Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Kabupaten Purbalingga Tahun 2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET 2023	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	%
Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai wawasan kebangsaan, partisipasi politik masyarakat		Persentase potensi konflik yang diredam tidak menjadi konflik	Persen	83,03	95	92,96	97,85
	Menurunnya potensi konflik dimasyarakat	Cakupan pencegahan/tangkal dini konflik	Rasio	N/A	31,9	2,63	8,24
	Meningkatnya Implementasi SAKIP KESBANGPOL	Nilai SAKIP	Indeks		72	73,01	101,40
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang politik dalam negeri	Cakupan pendidikan politik masyarakat	Persen		0,28	0,28	100
		Cakupan pendidikan wawasan kebangsaan	Persen		0,16	0,16	100



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET 2023	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	%
Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai wawasan kebangsaan, partisipasi politik masyarakat		Persentase potensi konflik yang diredam tidak menjadi konflik	Persen	83,03	95	92,96	97,85
Rata-rata Capaian Kinerja							81,50

Dari tabel di atas, pencapaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga di tahun 2023 menunjukkan rata-rata capaian kinerja sebesar 81,50 % atau kategori **Tinggi**

Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga diukur berdasarkan hasil pencapaian *sasaran* pada akhir tahun dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam *rencana strategis (RENSTRA)* SKPD.

1. Indikator Kinerja Utama Persentase potensi konflik yang diredam tidak menjadi konflik dengan target indikator 95% dan realisasi **92,96%** dengan tingkat kemajuan 97,85% didukung oleh:

- a) Adanya deteksi dini potensi konflik masyarakat yang telah diterapkan sampai dengan level pemerintahan desa/kelurahan
- b) Adanya Koordinasi dan komunikasi yang baik dengan *stakeholder* melalui Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Agen Kewaspadaan Dini Daerah;
- c) Penggunaan Sistem Informasi Kewaspadaan Dini Daerah (SIWASDINDA).

Capaian tersebut belum memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu sebesar 95%. Hal ini disebabkan tingginya potensi konflik yang ada di Kabupaten Purbalingga, yaitu sebanyak 71 potensi konflik, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 45 potensi konflik. Tingginya potensi konflik di tahun 2023 dipengaruhi beberapa faktor antara lain:

- a) Pulihnya aktivitas perekonomian masyarakat pasca pandemi Covid-19, sehingga banyak tumbuh usaha-usaha yang dikelola masyarakat yang



- kurang memperhatikan dampak lingkungan, seperti peternakan dan pertambangan galian C;
- b) Memasuki tahun politik yaitu telah dimulainya tahapan pemilu 2024. Tahapan pemilu 2024 menyumbang potensi konflik terbesar yaitu sebanyak 12 dari 71 potensi yang ada;
- c) Masih adanya potensi konflik internal kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berimbas kepada ancaman ketertiban umum dan gesekan antar ormas.
2. Indikator Kinerja Utama Cakupan pencegahan/tangkal dini konflik dengan target indikator 31,9 dan realiasi 2,63 dengan tingkat kemajuan 8,24% didukung oleh adanya sosialisasi penanganan konflik sosial kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan tokoh wanita pada wilayah yang memiliki potensi konflik tinggi.
3. Indikator Kinerja Utama Nilai SAKIP dengan target indikator 72 dan realisasi 73,01 dengan tingkat kemajuan 101,40% didukung oleh adanya komitmen pimpinan dan ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga dalam upaya meningkatkan implementasi SAKIP Kesbangpol;
4. Indikator Kinerja Utama Cakupan pendidikan politik masyarakat dengan target indikator 0,28 dan realisasi 0,28 dengan tingkat kemajuan 100% didukung oleh:
- a) Terselenggaranya Pendidikan Politik Masyarakat dengan sasaran pemilih pemula usia 16 s.d. 17 tahun di satuan pendidikan menengah atas dan kejuruan;
- b) Adanya koordinasi yang baik dengan lembaga pendidikan menengah dan kejuruan dalam upaya melaksanakan pendidikan politik kepada siswa SMA/SMK.
5. Indikator Kinerja Utama Cakupan pendidikan wawasan kebangsaan dengan target indikator 0,16 dan realisasi 0,16 dengan tingkat kemajuan 100% didukung oleh:
- a) Terselenggaranya Pendidikan Wawasan Kebangsaan dengan sasaran penduduk usia produktif;
- b) Adanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait serta Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pendidikan wawasan kebangsaan



b. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis

Realisasi atas indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga selama 5 tahun terakhir sebagaimana rincian pada tabel berikut

Tabel 3.4
 Realisasi Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis
 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai nilai wawasan kebangsaan dan partisipasi politik Masyarakat		Persentase potensi konflik yang diredam tidak menjadi konflik	Persen	N/A	N/A	N/A	95,12	92,96
	Meningkatkan Implementasi SAKIP KESBANGPOL	Nilai SAKIP KESBANGPOL	Indeks	N/A	N/A	65	71,16	73,01
	Menurunnya potensi konflik dimasyarakat	Cakupan pencegahan/tangkal dini konflik	Potensi	N/A	12	7	41	71,00
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang politik dalam negeri	Cakupan pendidikan politik masyarakat	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	0,60
		Cakupan pendidikan wawasan kebangsaan	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	0,13

Penjelasan atas capaian masing-masing indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran sesuai dengan tabel tersebut diatas adalah sebagai berikut

1. Capaian Indikator Tujuan

Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 adalah meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai nilai wawasan kebangsaan, partisipasi politik masyarakat mendapatkan nilai rata-rata **92,96%** dengan kategori **tinggi**. Capaian tersebut belum memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu sebesar 95%. Hal ini disebabkan tingginya potensi konflik yang ada di



Kabupaten Purbalingga, yaitu sebanyak 71 potensi konflik, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 45 potensi konflik. Tingginya potensi konflik di tahun 2023 dipengaruhi beberapa faktor antara lain:

- a. Pulihnya aktivitas perekonomian masyarakat pasca pandemi Covid-19, sehingga banyak tumbuh usaha-usaha yang dikelola masyarakat yang kurang memperhatikan dampak lingkungan, seperti peternakan dan pertambangan galian C;
- b. Memasuki tahun politik yaitu telah dimulainya tahapan pemilu 2024. Tahapan pemilu 2024 menyumbang potensi konflik terbesar yaitu sebanyak 12 dari 71 potensi yang ada.
- c. Masih adanya potensi konflik internal kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berimbas kepada ancaman ketertiban umum dan gesekan antar ormas.

Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5

Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Pengetahuan, Pemahaman, dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan dan Partisipasi Politik Masyarakat 5 tahun terakhir (2019 s.d 2023)

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Tahun 2023		
			2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai nilai wawasan kebangsaan dan partisipasi politik Masyarakat	Persentase potensi konflik yang diredam tidak menjadi konflik	Persen	N/A	N/A	N/A	95,12	95	92,96	97,85

Tujuan ini mendukung pencapaian misi kedua Bupati Purbalingga yaitu:

Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT / Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia



Dari keragaman yang ada, potensi konflik yang sering terjadi di Kabupaten Purbalingga secara umum tidak ada konflik SARA yang terjadi di wilayah Kabupaten Purbalingga dan situasi kondisi pun tetap kondusif. Adapun beberapa isu konflik yang terjadi pada tahun 2023 antara lain:

- Galian C;
- Ketidakpuasan warga terhadap kinerja perangkat desa;
- Sengketa internal organisasi kemasyarakatan;
- Keberadaan aliran ajaran agama yang dianggap menyimpang.

Selanjutnya dalam rangka mencapai target kinerja tujuan tersebut, langkah – langkah strategis yang telah ditempuh adalah:

1. Optimalisasi sasaran program penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan melaksanakan sosialisasi Wawasan Kebangsaan, Pembentukan Desa Pelopor Pancasila yaitu Desa Langgar Kecamatan Kejobong, Desa Babakan dan Desa Bojanegara Kecamatan Padamara;
2. Optimalisasi pemantauan kegiatan WNA dan NGO di masyarakat, agar dapat dilakukan antisipasi jika ada kegiatan yang mengarah pada penyebaran paham-paham yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan potensi ke kriminal;
3. Memperkuat kelembagaan FKDM sebagai upaya memperkuat deteksi dini dan cegah dini terhadap segala kemungkinan masalah IPOLEKSOSBUDKAM;
4. Optimalisasi koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
5. Optimalisasi koordinasi Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
6. Meningkatkan fasilitasi forum kemitraan FKUB, meningkatkan sosialisasi Kerukunan Hidup Beragama, sosialisasi moderasi beragama, sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pendirian rumah ibadah dan sosialisasi wawasan kebangsaan serta pembauran kebangsaan;
7. Meningkatkan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan keormasan;
8. Fasilitasi kegiatan ormas;
9. Memberikan edukasi kepada masyarakat luas mengenai berita hoax, melalui tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh keagamaan.



2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Capaian Indikator kinerja sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga tahun 2023 adalah sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Purbalingga Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatkan Implementasi SAKIP KESBANGPOL	Nilai SAKIP KESBANGPOL	Indeks	72	73,01	101,4
Menurunnya potensi konflik dimasyarakat	Cakupan pencegahan/tangkal dini konflik	Potensi	45	71,00	35
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang politik dalam negeri	Cakupan pendidikan politik Masyarakat	Persen	0,28	0,28	100
	Cakupan pendidikan wawasan kebangsaan	Persen	0,16	0,16	100

Capaian kinerja sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga tahun 2023 dijelaskan secara rinci dengan membandingkannya dengan pencapaian kinerja tahun sebelumnya sebagai berikut:

1) Meningkatkan kualitas kelembagaan KESBANGPOL

Capaian sasaran strategis "*Meningkatnya Kelembagaan Kesbangpol*" nilai capaian SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 mendapatkan nilai 73,01 melampaui target tahun 2023 yaitu 72, atau sebesar 101,4% (**Sangat Tinggi**) dengan predikat "BB" (Sangat Baik), yang berarti bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga akuntabilitas kerjanya sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.



Tabel 3.7

Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kelembagaan Kesbangpol
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Tahun 2023		
			2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Implementasi SAKIP KESBANGPOL	Nilai SAKIP KESBANGPOL	Indeks	N/A	N/A	65	71,16	72	73,01	101,4

Rincian nilai setiap komponen sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
			Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
1	Perencanaan Kinerja	30,00	6,00	6,30	10,50	22,80
2	Pengukuran Kinerja	30,00	4,80	6,30	10,50	21,60
3	Pelaporan Kinerja	15,00	2,70	3,15	5,25	11,10
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	3,50	5,25	8,75	17,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100,00	17,00	21,00	35,00	73,01

- a) Hambatan/Kendala yang Dihadapi
- Beberapa Hambatan/kendala dalam pencapaian target kinerja sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Evaluasi SAKIP oleh Tim Evaluator Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut:
- dokumen Perencanaan Kinerja pada aspek kualitas sebagian besar criteria telah terpenuhi namun belum seluruh Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga menyusun Perjanjian Kinerja bulanan dan Laporan Capaian Kinerja Bulanan pada aplikasi e-kinerja secara tertib dan tepat waktu;
 - Seluruh Pegawai sudah mengisi Aplikasi Pengukuran Kinerja (e-kinerja) dan print out e-kinerja telah ditandatangani atasan namun belum seluruhnya diverifikasi atasan pada aplikasi e-kinerja;
 - aplikasi e-kinerja belum dimanfaatkan secara optimal;



- belum ada aplikasi e-sakip Kabupaten yang digunakan untuk pengumpulan data dan pengukuran capaian kinerja;
- SKP Pegawai belum sepenuhnya selaras dengan atasan;
- Kegiatan Rapat Penyusunan LKjIP telah dilaksanakan namun informasi dalam dokumentasinya belum memadai.

b) Upaya dan Strategi Pencapaian Kinerja

Berkaitan dengan hal tersebut, strategi yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga dalam menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi SAKIP diantaranya:

- Memerintahkan seluruh pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga agar menyusun Perjanjian Kinerja bulanan dan Laporan Capaian Kinerja bulanan pada aplikasi e-kinerja secara tertib dan tepat waktu secara selaras dengan atasan;
- Melaksanakan sekaligus memerintahkan kepada Pejabat untuk melakukan verifikasi atasan pada mekanisme pengukuran kinerja pada aplikasi e-kinerja;
- Memanfaatkan aplikasi e-Kinerja lebih optimal;
- Berkoordinasi dengan instansi terkait (Bagian Organisasi Setda) untuk mendorong pembuatan dan penggunaan aplikasi e-sakip kabupaten yang digunakan untuk pengumpulan data dan pengukuran capaian kinerja;
- Meningkatkan pengendalian terhadap pengukuran kinerja pegawai, terutama keselarasan SKP antar lini vertical;
- melaksanakan seluruh rekomendasi tim evaluator SAKIP.

2) Menurunnya Potensi Konflik di Masyarakat

Capaian kinerja sasaran strategis Menurunnya potensi konflik di Masyarakat dengan indikator kinerja Cakupan pencegahan/tangkal dini konflik pada tahun 2023 sebesar 35% dari target 31,9%/10.000 penduduk, hanya tercapai 2,92%/10.000 penduduk. atau **Sangat Rendah**. Hal ini disebabkan formulasi yang digunakan adalah penduduk yang mendapatkan sosialisasi pencegahan konflik sosial dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.



Data capaian kinerja sasaran dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8.

Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Potensi Konflik di Masyarakat

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Tahun 2023		
			2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%Capaian Kinerja
Menurunnya potensi konflik dimasyarakat	Cakupan pencegahan/tangkal dini konflik	Potensi	N/A	N/A	N/A	8,76	31,9	2,92	35

Potensi konflik sosial yang dilaporkan di Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebesar 41 potensi menjadi 71 potensi konflik di tahun 2023. Kenaikan potensi konflik ini telah diprediksi sebelumnya berdasarkan analisis terhadap potensi perkembangan kerawanan sosial yang mungkin terjadi pasca pandemi Covid-19 dan dimulainya tahapan pemilu 2024. Dari 71 potensi konflik yang muncul di masyarakat sebanyak 66 potensi konflik dapat diredam tidak menjadi konflik, dan sebanyak 5 (lima) potensi konflik tidak dapat diredam melalui jalur mediasi dan musyawarah mufakat, kemudian berkembang menjadi konflik berupa aksi unjuk rasa. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa cakupan tangkal dini konflik sosial pada tahun 2023 adalah Kenaikan potensi konflik pada tahun ini dapat di jelaskan pada tabel berikut :



Tabel 3.9.
 Potensi Konflik yang dilaporkan

No.	Kecamatan	Jenis Potensi Konflik																										Jumlah
		Ideologi				Politik						Ekonomi								Sosial				Budaya				
		Kelompok Radikal	Pendirian Tempat Ibadah	Aliran Keagamaan	Ideologi Lain	Parpol	Ormas	Pilkades	Pengadaan Perangkat Desa	Pemilu	Pemerintahan	Pendirian Tower	Gajian C	Pendirian Perusahaan	Peternakan	Pertanian	Buruh	Ketenagakerjaan	Pertanahan	PKL	Lain2	Batas Desa	Bansos	Olahraga	Prostitusi	Seni Budaya	Aliran Kepercayaan	
1	Kemangkon			1		1					1		1															4
2	Kertanegara					1	1		1				1						1			1						6
3	Bojongsari							1														1						2
4	Purbalingga							1			1			1	1	1	1	1										7
5	Kejobong																					1						1
6	Pengadegan																											0
7	Bobotsari							1					1						1			1						4



Apabila dihitung capaian penurunan angka konflik sosial pada tahun 2023 adalah sebesar 0,058 dengan perhitungan 6 kejadian per 10.000 jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga, maka capaian tersebut sangat tinggi. Jumlah Penduduk Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2023 sebanyak 1.027.521 jiwa. Pada Tahun 2023 potensi konflik yang terjadi di wilayah Kabupaten Purbalingga sebanyak 71 potensi konflik. Dari 71 potensi konflik yang muncul di masyarakat sebanyak 66 potensi konflik dapat diredam tidak menjadi konflik, dan sebanyak 5 (lima) potensi konflik tidak dapat diredam melalui jalur mediasi dan musyawarah mufakat, kemudian berkembang menjadi konflik berupa aksi unjuk rasa.

Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Angka Konflik Sosial} &= \frac{\text{Jumlah Konflik Sosial} \times 10.000}{\text{Jumlah Penduduk}} \\ &= \frac{5 \times 10.000}{1.027.521} \\ &= 0,048 \end{aligned}$$

Menurunnya Angka Konflik Sosial dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.10.

Menurunnya Angka Konflik Sosial

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Target Akhir
		2018	2019	2020	2021	2022				
Angka Konflik sosial per 10.000 Penduduk	Angka	0,116	0,084	0,119	0,069	0,029	0,058	0,048	120,83	100
Rata – rata Capaian Kinerja									120,83	



Dari tabel tersebut di atas, dapat disampaikan bahwa konflik Poleksosbud di Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebesar 0,029 menjadi sebesar 0,048 di tahun 2023

Kenaikan konflik pada tahun ini dapat di jelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.11.

Rekapitulasi Kejadian Konflik Tahun 2023

No	Tanggal	Keterangan
1.	22 November 2023	Aksi mogok kerja karyawan PT. John Toys di Desa Jetis Kecamatan Kemangkon terkait tertundanya pembayaran gaji karyawan.
2.	17 Juni 2023	Penolakan warga Desa Kemangkon Kecamatan Kemangkon atas aktivitas penambangan galian C menggunakan alat berat
3.	7 Mei 2023	Aksi Penolakan warga Desa Arenan Kecamatan Kaligondang atas aktivitas penambangan galian C menggunakan alat berat
4.	29 Agustus 2023	Unjuk rasa warga Desa Brecek Kecamatan Kaligondang menuntut pemberhentian Sekretaris Desa disebabkan ketidakpuasan warga atas pelaksanaan pembangunan talud
5.	24 Januari 2023	Aksi masa PSHT di alun-alun Purbalingga menuntut penindakan atas penggunaan hak paten oleh organisasi kemasyarakatan lain tanpa ijin.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa target yang telah di tetapkan telah tercapai, hal ini dikarenakan konflik yang terjadi mengalami penurunan menjadi adalah 5 (lima) kejadian. Adapun penyebab yang paling dominan dari potensi konflik di tahun 2023 adalah adanya penggunaan alat berat pada pertambangan Galian C. Penggunaan alat berat pada pertambangan Galian C ditakutkan berdampak buruk bagi lingkungan sekitar pertambangan diantaranya tergerusnya lahan warga yang berada di sekitar area pertambangan, dan rusaknya akses jalan yang dilalui kendaraan pengangkut hasil tambang.

Dengan capaian yang hanya sebesar 63,8% perlu adanya langkah langkah antisipatif yang harus ditempuh oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga agar potensi konflik yang dilaporkan dapat diredam tidak berkembang menjadi konflik, dan capaian kinerja dapat dipertahankan dan ditingkatkan.



Dalam upayanya untuk menurunkan konflik di Kabupaten Purbalingga, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga selaku perangkat daerah yang menangani permasalahan konflik sosial telah menempuh langkah-langkah antara lain :

- a) Membentuk dan memfasilitasi kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Purbalingga sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
- b) Melaksanakan kegiatan fasilitasi penanganan konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Purbalingga guna mendapatkan penyelesaian diantara pihak-pihak yang bermasalah;
- c) Melaksanakan Sosialisasi Pencegahan Konflik Sosial ke masyarakat bersama instansi terkait. Sosialisasi tersebut dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam rangka kewaspadaan dini dan cegah dini terhadap potensi konflik yang setiap saat bisa muncul seiring dinamika sosial masyarakat yang setiap waktu berubah dan berkaitan erat dengan fenomena sosial yang terjadi saat itu;
- d) Memberdayakan masyarakat utamanya para tokoh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dini dan cegah dini melalui wadah *Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat* (FKDM). Hal ini diantaranya dilakukan melalui pertemuan operasional FKDM sebagai wahana menggali informasi, menyikapi dan mengevaluasi dinamika situasi kondisi daerah setempat;



- e) Memberdayakan para tokoh agama dalam menjaga kerukunan antar umat beragama melalui wadah Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB). Hal ini diantaranya dilakukan melalui pertemuan FKUB sebagai sarana silaturahmi dan menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul antar umat beragama, serta menyikapi dinamika sosial masyarakat yang setiap waktu berubah dengan cepat yang dapat mempengaruhi kehidupan umat beragama;
- f) Memberdayakan Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Purbalingga untuk turut serta menjaga kerukunan dan meminimalisir potensi konflik SARA;
- g) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba melalui penyuluhan P4GN di wilayah Kabupaten Purbalingga untuk meminimalisir kasus narkoba yang dapat berakibat pada permasalahan sosial dan kriminal;
- h) Membentuk dan memfasilitasi Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
- i) Mengadakan sosialisasi tentang Peraturan Perundang-undangan Organisasi Kemasyarakatan;
- j) Mengadakan sosialisasi pemantapan faham Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan pembentukan Desa Pelopor Pancasila;
- k) Memberdayakan dan mengembangkan Agen Kewaspadaan Dini Daerah (AWASDINDA) yang saat ini beranggotakan perangkat desa pada desa-desa yang memiliki tingkat kerawanan tinggi maupun sedang di bawah koordinasi Kasi Pemtrantibum Kecamatan. AWASDINDA ini bertujuan melaporkan potensi konflik yang terjadi di wilayah masing-masing agen kepada Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial untuk mendapatkan rekomendasi penyelesaian agar tidak berkembang menjadi konflik.

3) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang politik dalam negeri

Capaian Kinerja sasaran strategis "*Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang politik dalam negeri*" dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu Cakupan Pendidikan Politik Masyarakat dan Cakupan Pendidikan Wawasan Kebangsaan"

Pada indikator kinerja 1 yaitu Cakupan Pendidikan Politik Masyarakat mendapatkan nilai rata-rata 100% dari target yang ditetapkan pada tahun



2023 yaitu 0,28% dari jumlah penduduk usia 16-17 tahun. dengan kategori **Sangat Tinggi**. Untuk indikator kinerja 2 yaitu Cakupan Pendidikan Wawasan Kebangsaan mendapatkan nilai rata-rata 100% dari target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu 0,16 dari penduduk usia produktif, dengan kategori **Sangat Tinggi**. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12.

**Capaian Kinerja Meningkatnya Peran Serta
Masyarakat dalam Bidang Politik Dalam Negeri**

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Tahun 2023		
			2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%Capaian Kinerja
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang politik dalam negeri	Cakupan pendidikan politik masyarakat	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	0,28	0,28	100
	Cakupan pendidikan wawasan kebangsaan	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	0,16	0,16	100

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Secara umum dalam masyarakat tradisional yang sifat kepemimpinan politiknya lebih ditentukan oleh segolongan elit penguasa, keterlibatan warga negara dalam ikut serta memengaruhi pengambilan keputusan, dan memengaruhi kehidupan bangsa relatif sangat kecil. Warga negara yang hanya terdiri dari masyarakat sederhana cenderung kurang diperhitungkan dalam proses-proses politik

Menurut Miriam Budiarto secara umum mengartikan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah. Sedangkan menurut Keith Faulks partisipasi politik adalah keterlibatan aktif individu maupun kelompok dalam proses pemerintahan yang berdampak pada kehidupan mereka. Hal ini meliputi keterlibatan dalam pembuatan keputusan maupun aksi oposisi, yang penting partisipasi merupakan proses aktif. Jadi dapat disimpulkan partisipasi politik adalah adanya kegiatan atau keikutsertaan warga negara dalam proses pemerintahan. Kemudian kegiatan tersebut diarahkan untuk memengaruhi jalannya pemerintahan. Sehingga dengan adanya partisipasi politik tersebut akan berpengaruh terhadap kehidupan mereka.

Dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat ada beberapa bagian yang turut berperan dalam meningkatkan partisipasi politik

masyarakat antara lain adalah:

- a) KPUD. Sebagai penyelenggara Pemilu KPUD memiliki peran utama meningkatkan partisipasi politik masyarakat khususnya dalam hal menggunakan hak pilihnya. Hal tersebut termuat dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 10 menyebutkan bahwa: “Salah satu tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota adalah menyelenggarakan sosialisasi dan penyelenggaraan Pemilu dan atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/ Kota kepada masyarakat”.¹⁷ KPUD meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui cara sosialisasi dan pendidikan politik masyarakat. Cara tersebut dilakukan melalui tiga tahapan yakni melalui komunikasi tatap muka, komunikasi melalui media, dan melalui mobilisasi sosial.
- b) Partai politik dalam UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik pada pasal 10 disebutkan: “tujuan khusus partai politik adalah meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan. Selanjutnya dalam pasal 11 dijelaskan: “partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sosialisasi dan pendidikan politik oleh Partai Politik sedikitnya dilakukan dalam tiga hal, yakni: melalui sosialisasi para kader, pendidikan politik, dan melalui optimalisasi organisasi sayap partai.
- c) Media massa. Di era globalisasi seperti saat ini, media memiliki peran yang sangat besar dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Melalui media, komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat menjadi lebih mudah. Begitu juga dalam Pemilukada, media menjadi saluran komunikasi yang sangat tepat untuk menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat. Sebagai lembaga yang netral, saat ini media menjadi salah satu lembaga yang sangat dipercayai oleh masyarakat. Dengan begitu, dalam peningkatan partisipasi masyarakat media diharapkan mampu memberikan dorongan kepada masyarakat untuk mau menggunakan hak pilinya dalam Pemilukada. Terdapat tiga media yang sangat efektif digunakan dalam peningkatan partisipasi politik masyarakat Kabupaten Purbalingga yaitu: stasiun televisi Banyumas TV,

Lembaga Penyiaran Suara Perwira dan Koran Radar Banyumas.

- d) *Civil Society*. Organisasi masyarakat yang banyak bergerak dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Pemuda Pancasila dan Persatuan Ketua Rukun Tetangga. Keempat lembaga sosial tersebut pada intinya memiliki cara yang sama dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Yakni melakukan sosialisasi dan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Dengan melibatkan banyak lembaga sosial tersebut diharapkan masyarakat dari berbagai elemen terdorong untuk berpartisipasi

Peran pemangku kepentingan dalam meningkatkan partisipasi politik pada akhirnya telah terjawab dengan adanya keberhasilan jalannya Pemilukada Tahun 2020 sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan oleh KPUD. Berdasarkan penghitungan KPUD terlihat dari 746.001 daftar pemilih yang termuat dalam DPT, masyarakat yang menggunakan hak pilihnya adalah 544.750 atau sebesar 73%.

Partisipasi politik dalam Pemilukada tahun 2020 merupakan pencapaian partisipasi politik yang paling tinggi jika dibandingkan dengan Pemilukada sebelumnya. Pada tahun 2015 terjadi peningkatan partisipasi politik masyarakat sebesar 12% apalagi pelaksanaan pemilukada tahun 2020 dilaksanakan ditengah pandemic *Covid-19*. Untuk di Jawa Tengah Pemilukada tahun 2020 partisipasi pemilih sebesar 74,34%. Dengan perolehan tertinggi adalah Kabupaten Boyolali sebesar 89,53%, sedang terendah adalah Kabupaten Grobogan sebesar 63,55%.

Sehingga dari hal tingkat partisipasi pemilih Kabupaten Purbalingga bisa dikatakan tidak tertinggal jauh dengan raihan tingkat Provinsi Jawa Tengah. Namun demikian, beberapa pihak menilai bahwa pencapaian angka 73% itu tidak bisa menjadi ukuran partisipasi politik masyarakat. Hal itu dikarenakan angka tersebut didapat dari hasil hitung- hitungan dari DPT yang ada. Sedangkan jumlah DPT itu sendiri tidak sesuai dengan jumlah real yang ada di masyarakat. Permasalahan DPT memang menjadi masalah yang selalu hadir dalam pemilihan umum.

Tingkat ketidakhadiran di TPS dalam Pemilukada tahun 2020 mencapai 26,98%. Namun menurut banyak pihak angka ini tidak berarti menunjukkan bahwa 26,98% masyarakat itu semuanya apatis. Ada banyak

alasan yang mengakibatkan orang tidak menggunakan hak pilihnya yang dapat dikarenakan :

- a) Sebagian dari DPT sedang bekerja di luar kota dan banyak mahasiswa yang sedang menempuh studi di luar kota yang tidak sempat pulang pada hari pencoblosan;
- b) Pemilih manula dan pemilih disabilitas yang sudah tidak mungkin bisa datang ke TPS masih masuk ke daftar DPT;
- c) Adanya wabah covid-19 yang mempengaruhi orang untuk datang ke TPS;
- d) Masyarakat yang tidak datang karena benar-benar apatis.

Pada pemilu 2024, diharapkan terjadi peningkatan partisipasi politik masyarakat Kabupaten Purbalingga. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga dalam mencapai tujuan strategis "*Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi*" dengan sasaran strategis *Meningkatnya demokrasi yang sehat dan partisipasi politik masyarakat* diwujudkan dalam program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik, mengagendakan kegiatan Pendidikan politik baik melalui partai politik melalui hibah bantuan keuangan partai politik dengan komposisi penggunaan hibah sebesar 60% untuk Pendidikan politik masyarakat, maupun sosialisasi langsung dengan sasaran pemilih pemula dan pemilih perempuan. Selain itu, bersama dengan KPUD, Bawaslu Kabupaten Purbalingga, dan Pengamat Politik FISIP UNSOED bersinergi dalam pencapaian tujuan Bersama yaitu meningkatkan partisipasi politik masyarakat dengan kegiatan secara rutin melaksanakan diskusi interaktif di media penyiaran pemerintah yaitu RRI Programa 1 Purwokerto dengan tajuk "*Dialog Lintas Pagi Purwokerto*" yang juga direlay oleh Radio Gema Sudirman Purbalingga. Kesbangpol Purbalingga juga dilibatkan dalam program kegiatan Bawaslu yaitu pembentukan Desa Anti Politik Uang (Desantiku) dengan sasaran desa-desa di wilayah Kabupaten Purbalingga yang dipandang memiliki riwayat kehidupan demokrasi yang kurang sehat, terutama terdapat kasus politik uang yang menonjol dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan Kepala Desa.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui perangkat daerah terkait juga terlibat secara aktif dalam upaya menyosialisasikan penyelenggaraan

Pemilu Tahun 2024 antara lain :

- a) Fasilitasi kegiatan organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial politik dalam rangka melibatkan peran ormas/orsospol guna menggandeng masyarakat lebih aktif/proaktif dalam pelaksanaan Pemilu sebagai pemilih;
- b) Menjalin hubungan kerjasama dan komunikasi melalui forum koordinasi pimpinan daerah/muspida, tokoh agama, tokoh masyarakat dan segenap elemen masyarakat;
- c) Sosialisasi kepada warga masyarakat umum pada momen kegiatan kemasyarakatan yang rutin dilaksanakan, seperti Subuh Berjamaah, Gerakan Bersama Rakyat (GEBRAK) Gotong Royong. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), dan pada setiap kesempatan lainnya yang dihadiri langsung oleh Kepala Daerah, maupun Kepala Wilayah seperti Camat/Lurah;
- d) Melalui media elektronik seperti Lembaga Penyiaran Lokal "Suara Perwira", facebook resmi Pemkab Purbalingga (Dinkominfo dan Humas Protokol Purbalingga);
- e) Mengadakan Pendidikan politik bagi pemilih pemula yaitu penduduk usia 16 s.d.17 tahun bekerjasama dengan SMA dan SMK di Kabupaten Purbalingga.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator tersebut adalah :

- a) Masyarakat merasa partisipasi mereka tidak akan memberikan perubahan berarti bagi kehidupan mereka terutama dari segi sosial dan ekonomi;
- b) Masyarakat kurang mampu memahami dinamika serta proses politik yang terjadi, sehingga mereka memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya dan cenderung apatis terhadap politik atau Pemilu;
- c) Masih marak dan membudayanya praktik *money politic*, sehingga ada anggapan di masyarakat pada umumnya kapan lagi mendapatkan uang dari kontestan pemilu kalau bukan pada saat mereka membutuhkan hak pilih masyarakat, maka apabila tidak dikasih uang untuk memilih dalam pemilu, mereka tidak akan datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya;
- d) Belum optimalnya peran partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat, khususnya pemilih pemula

Solusi yang dilakukan adalah :

- a) Diadakan sosialisasi, fasilitasi, peningkatan pendidikan politik masyarakat khususnya melalui peran partai politik.
- b) Melaksanakan Pendidikan Politik kepada seluruh elemen masyarakat (Toga/Toma, LSM, Ormas, pemilih perempuan, dan pemilih pemula);
- c) Melaksanakan Penguatan Pendidikan Politik kepada seluruh elemen masyarakat (Toga/Toma, LSM, Ormas, pemilih perempuan, dan pemilih pemula);
- d) Melaksanakan FGD Penguatan Budaya dan Etika Politik Masyarakat kepada Pelajar, Mahasiswa, dan Ormas;
- e) Melaksanakan Peningkatan Penanganan Dampak Politik Pilkada kepada seluruh elemen masyarakat (Toga/Toma, LSM, Unsur Penyelenggara Pilkada, Ormas, pemilih perempuan, dan pemilih pemula);
- f) Melaksanakan Penguatan Sistem dan Implementasi Pemilu/Pilkada kepada aparat pemerintah yang menangani Pemilu;
- g) Melaksanakan Monitoring / Pemantauan dampak politik Pemilu.
- h) Meningkatkan wawasan kebangsaan dan pendidikan bela negara dalam rangka meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air.

B. REALISASI ANGGARAN DAN ANALISIS EFISIENSI

1. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

Tahun Anggaran 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga mempunyai 6 Program, 13 Kegiatan dan 37 sub kegiatan. Adapun rincian selengkapnya, pada tabel berikut :

Tabel 3.13
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun Anggaran 2023

NO.	URAIAN	Kebi jakan	Target dalam Dokumen Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase	Efisiensi Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						23.636.791.000	22.761.984.341	96,30	874.806.659
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.575.322.000	2.389.009.431	92,77	186.312.569
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 persen	100 persen	100 %	3.992.000	3.808.200	95,40	183.800
	1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 dokumen	1 dokumen	100 %	2.332.000	2.219.100	95,16	112.900
	1.1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3 dokumen	3 dokumen	100 %	1.660.000	1.589.100	95,73	70.900
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 persen	100 persen	100 %	1.964.820.000	1.818.069.841	92,53	146.750.159
	1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		21 ASN	21 ASN	100 %	1.858.303.000	1.712.593.415	92,16	145.709.585
	1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 bulan	12 bulan	100 %	75.458.000	74.426.426	98,63	1.031.574
	1.2.3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		350 dokumen	350 dokumen	100 %	31.059.000	31.050.000	99,97	9.000
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100 persen	100 persen	100 %	3.320.000	3.300.000	99,40	20.000
	1.3.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		2 laporan	2 laporan	100 %	3.320.000	3.300.000	99,40	20.000
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 persen	100 persen	100 %	6.587.000	5.584.612	84,78	1.002.388
	1.4.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		4 orang	2 orang	50%	6.587.000	5.584.612	84,78	1.002.388
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 persen	100 persen	100 %	67.418.000	60.664.775	89,98	6.753.225
	1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		12 bulan	12 bulan	100 %	1.200.000	1.194.800	99,57	5.200
	1.5.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		12 bulan	12 bulan	100 %	48.670.000	42.173.825	86,65	6.496.175
	1.5.3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		12 bulan	12 bulan	100 %	1.200.000	1.180.000	98,33	20.000
	1.5.4 Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 bulan	12 bulan	100 %	9.000.000	8.951.150	99,46	48.850
	1.5.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 bulan	12 bulan	100 %	3.660.000	3.565.000	97,40	95.000
	1.5.6 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		12 bulan	12 bulan	100 %	3.688.000	3.600.000	97,61	88.000
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 persen	100 persen	100 %	35.000.000	34.998.800	100,00	1.200
	1.6.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		41 unit	41 unit	100 %	35.000.000	34.998.800	100,00	1.200
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen	100 persen	100 %	271.026.000	241.058.653	88,94	29.967.347
	1.7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 bulan	12 bulan	100 %	537.000	71.500	13,31	465.500
	1.7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi,		12 bulan	12 bulan	100 %	61.320.000	38.871.153	63,39	22.448.847

			Sumber Daya Air dan Listrik								
		1.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12 bulan	12 bulan	100 %	9.000.000	9.000.000	100,00	-
		1.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 bulan	12 bulan	100 %	200.169.000	193.116.000	96,48	7.053.000
	1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 persen	100 persen	100 %	223.159.000	221.524.550	99,27	1.634.450
		1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		14 unit	14 unit	100 %	159.009.000	158.235.550	99,51	773.450
		1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		30 unit	30 unit	100 %	9.150.000	9.138.000	99,87	12.000
		1.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		12 bulan	12 bulan	100 %	55.000.000	54.151.000	98,46	849.000
2	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan							555.928.000	545.888.368	98,19	10.039.632
	2.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			31,9 per 10000 penduduk	1,95 per 10000 penduduk	6,10%	555.928.000	545.888.368	98,19	10.039.632
		2.1.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		12 dokumen	12 dokumen	100%	26.976.000	20.918.900	77,55	6.057.100
		2.1.2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		102 orang	102 orang	100%	526.877.000	523.469.468	99,35	3.407.532
		2.1.3	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan		12 laporan	12 laporan	100%	2.075.000	1.500.000	72,29	575.000
3	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik							18.318.266.000	18.064.914.540	98,62	253.351.460
	3.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			31,9 per 10000 penduduk	7,01 per 10000 penduduk	21,96%	18.318.266.000	18.064.914.540	98,62	253.351.460
		3.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		1000 orang	720 orang	72%	18.293.191.000	18.058.714.540	98,72	234.476.460
		3.1.2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		1000 orang	720 orang	72%	23.000.000	5.050.000	21,96	17.950.000
		3.1.3	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,		12 laporan	12 laporan	100%	2.075.000	1.150.000	55,42	925.000

			Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah							
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN						824.745.000	759.425.000	92,08	65.320.000
	4.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		23,95 persen	29,24 persen	142,86 %	824.745.000	759.425.000	92,08	65.320.000
		4.1.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12 dokumen	12 dokumen	100%	226.475.000	195.522.300	86,33	30.952.700
		4.1.2	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Pelaksanaan	1000 orang	1000 orang	100%	591.770.000	562.402.700	95,04	29.367.300
		4.1.3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12 laporan	12 laporan	100%	6.500.000	1.500.000	23,08	5.000.000
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA						150.809.000	133.105.205	88,26	17.703.795
	5.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		31,9 per 10000 penduduk	2,92 per 10000 penduduk	9,15%	150.809.000	133.105.205	88,26	17.703.795
		5.1.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	12 dokumen	12 dokumen	100%	25.524.000	16.955.205	66,43	8.568.795
		5.1.2	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	900 orang	300	30%	123.210.000	116.150.000	94,27	7.060.000
		5.1.3	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	12 laporan	12 laporan	100%	2.075.000	-	-	2.075.000
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL									
	6.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		41 potensi konflik	71 potensi konflik	63,38%	1.211.721.000	869.641.797	72,17	342.079.203
		6.1.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 dokumen	12 dokumen	100%	434.014.000	367.287.866	84,63	66.726.134

	6.1.2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		2880 orang	1416 orang	49,2%	419.998.000	381.049.100	90,73	38.948.900
	6.1.3	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		12 laporan	12 laporan	100%	59.427.000	53.913.200	90,72	5.513.800
	6.1.4	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		12 laporan	12 laporan	100%	298.282.000	67.391.631	22,59	230.890.369

Berdasarkan tabel 3.8 di atas, program-program prioritas Kantor Kesbangpol Kabupaten Purbalingga pada Tahun Anggaran 2023 diuraikan dalam 6 Program, 12 Kegiatan dan 37 sub kegiatan.

Anggaran belanja Badan Kesbangpol Kabupaten Purbalingga pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 23.636.791.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 22.761.984.341,- atau 96,30% yang meliputi :

- 1) Belanja Operasi sebesar Rp. 23.601.792.200 ,- dengan realisasi sebesar Rp. 22.726.985.541,- atau sebesar 96,29%;
- 2) Belanja Modal sebesar Rp.34.998.800,- dengan realisasi sebesar Rp.34.998.800,- atau 100%

2. Analisis Efisiensi

Pencapaian Kinerja Sasaran didukung dengan program sebagai berikut:

Tabel 3.14
 Capaian Kinerja Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Kabupaten Purbalingga Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Pendukung
Meningkatkan kualitas kelembagaan KESBANGPOL	Nilai SAKIP KESBANGPOL	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Menurunnya potensi konflik dimasyarakat	Cakupan pencegahan/tangkal dini konflik	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang politik dalam negeri	Cakupan pendidikan politik Masyarakat	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
	Cakupan pendidikan wawasan kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Analisis data efisiensi sumber daya dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.15
 Data Efisiensi Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Kabupaten Purbalingga Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya kualitas kelembagaan KESBANGPOL	Nilai SAKIP KESBANGPOL	72	73,01	101,4	2.575.322.000	2.389.009.431	92,77	8,63
Menurunnya potensi konflik dimasyarakat	Cakupan pencegahan/tangkal dini konflik	45	71	97,85	1.211.721.000	869.641.797	71,77	26,08
		31,9	2,92	9,15	150.809.000	133.105.205	88,26	-79,11
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang politik dalam negeri	Cakupan pendidikan politik Masyarakat	0,28	0,28	100	18.874.194.000	18.610.802.908	98,6	1,40
	Cakupan pendidikan wawasan kebangsaan	0,16	0,16	100	555.928.000	545.888.368	98,19	1,81

Adapun analisis atas efektifitas penggunaan anggaran, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16
Data Analisis atas Efektifitas Penggunaan Anggaran
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2023

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Anggaran/ Realisasi	Capaian Anggaran	Keterangan
Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai nilai wawasan kebangsaan, partisipasi politik Masyarakat		Persentase potensi konflik yang diredam tidak menjadi konflik	97,85	23.636.791.000	22.761.984.341	Efisien
	Meningkatnya kualitas kelembagaan KESBANGPOL	Nilai SAKIP KESBANGPOL	101,4	2.389.009.431	92,77	Efisien
	Menurunnya potensi konflik dimasyarakat	Cakupan pencegahan/tangkal dini konflik	97,85	869.641.797	71,77	Efisien
			9,15	133.105.205	88,26	Belum Efisien
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang politik dalam negeri	Cakupan pendidikan politik masyarakat	100	18.610.802.908	98,60	Efisien
		Cakupan pendidikan wawasan kebangsaan	100	545.888.368	98,19	Efisien

Penggunaan anggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran tahun 2023 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023, untuk mencapai 1 Tujuan dan 3 Sasaran dianggarkan sebesar Rp23.636.791.000,00 dan terealisasi sebesar Rp22.761.984.341,00 atau 96,30%. Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dan persentase penyerapan anggaran, disajikan sebagai berikut:

1) Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai nilai wawasan kebangsaan, partisipasi politik masyarakat

Hasil perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dengan persentase penyerapan anggaran pada tujuan Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai nilai wawasan kebangsaan, partisipasi politik masyarakat dikatakan **efisien** dalam penggunaan sumber daya, dilihat dari realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut sebesar Rp23.636.791.000,00 dan terealisasi sebesar Rp22.761.984.341,00 atau 96,30% dibandingkan dengan capaian

kinerja tujuan sebesar 97,85%. Efisiensi tersebut merupakan hasil upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yaitu:

- a) Melakukan koordinasi dengan *stakeholder* yang memiliki tujuan dan sasaran kinerja yang selaras dengan tujuan dan sasaran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan politikmKabupaten Purbalingga;
- b) Mengintegrasikan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga dengan Program dan Kegiatan *Stakeholder*, terutama Lembaga Pendidikan yaitu SMA dan SMK se Kabupaten Purbalingga, Lembaga Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu), serta instansi vertikal yaitu Kantor Imigrasi Cilacap dan Wonosobo, Kejaksaan Negeri Purbalingga, Kepolisian Resor Purbalingga, Komando Distrik Militer 0702/Purbalingga, Batalyon Infanteri 406/Purbalingga, Lanud JB. Soedirman/Purbalingga, Pengadilan Negeri Purbalingga, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI;
- c) Melakukan koordinasi dengan pemerintahan kecamatan dan desa serta Organisasi Kemasyarakatan.

2) Meningkatnya implementasi SAKIP KESBANGPOL

Hasil perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran pada sasaran Meningkatnya Implementasi SAKIP KESBANGPOL dikatakan **efisien** dalam penggunaan sumber daya, dilihat dari realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut sebesar Rp.2.389.009.431,00 dari anggaran sebesar Rp.2.575.322.000,00 atau sebesar 92,77% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 101,40%. Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a) Terintegrasinya sistem perencanaan, keuangan, monitoring evaluasi, dan kinerja;
- b) Adanya komitmen pimpinan dan ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga dalam upaya meningkatkan implementasi SAKIP Kesbangpol;

3) Menurunnya potensi konflik dimasyarakat

Hasil perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran Menurunnya potensi konflik dimasyarakat dengan persentase penyerapan anggaran pada indikator kinerja Cakupan pencegahan/tangkal dini konflik yang dilaksanakan melalui Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dikatakan **efisien** dalam penggunaan sumber daya, dilihat dari realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut sebesar Rp.869.641.797,00 dari anggaran sebesar Rp.1.211.721.000,00 atau sebesar 71,77% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 97,85%, namun pada pelaksanaan program Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya dengan capaian

kinerja sebesar 9,15 didukung anggaran sebesar Rp.150.809.000,00 realisasi sebesar Rp.133.105.205,00 atau 88,26 dikatakan tidak efisien dikarenakan anggaran pada program tersebut sebesar Rp.80.000.000,- atau 60% adalah hibah kepada pihak lain, dimana kinerja dari penerima hibah tidak dapat dihitung sebagai kinerja pemberi hibah.

Secara umum, efisiensi yang dicapai pada sasaran ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a) Adanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait serta Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pendidikan wawasan kebangsaan dengan sasaran penduduk usia produktif;
 - b) Adanya deteksi dini potensi konflik masyarakat yang telah diterapkan sampai dengan level pemerintahan desa/kelurahan;
 - c) Adanya Koordinasi dan komunikasi yang baik dengan Forkopimda dan *stakeholder* melalui Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Agen Kewaspadaan Dini Daerah;
 - d) Implementasi Inovasi Sistem Informasi Kewaspadaan Dini Daerah (SIWASDINDA).
- 4) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang politik dalam negeri
- Hasil perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran pada sasaran Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang politik dalam negeri dikatakan **efisien** dalam penggunaan sumber daya, dilihat dari realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp.18.610.802.908,00 dari anggaran sebesar Rp.18.874.194.000,00 atau sebesar 98,60% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100%. Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:
- a) Adanya koordinasi yang baik dengan lembaga pendidikan menengah dan kejuruan dalam upaya melaksanakan pendidikan politik kepada siswa SMA/SMK sehingga dapat terselenggara Pendidikan Politik Masyarakat dengan sasaran pemilih pemula usia 16 s.d. 17 tahun di satuan pendidikan menengah atas dan kejuruan;
 - b) Adanya koordinasi yang baik dengan *stakeholder* penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu Kabupaten Purbalingga);
 - c) Terbinanya organisasi kemasyarakatan melalui fasilitasi kegiatan kemasyarakatan ormas;
 - d) Fasilitasi kegiatan pendidikan politik melalui bantuan keuangan partai politik berjalan dengan baik.

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja

Keberhasilan program/kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga didukung adanya anggaran yang mencukupi dan koordinasi yang baik dengan *stakeholder*, antara lain:

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

Indikator kinerja dari program ini adalah cakupan masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan. Program penguatan Ideologi dan Karakter Kebangsaan menunjang pencapaian Tujuan dan Sasaran 1 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga. Dalam pelaksanaan program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan menunjukkan keberhasilan program dengan indikator tidak adanya potensi konflik ideologi yang mencuat di wilayah Kabupaten Purbalingga.

2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.

Indikator kinerja dari program ini adalah Cakupan masyarakat yang memperoleh Pembinaan Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik menunjang pencapaian Tujuan dan Sasaran 3 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga. Dalam pelaksanaan Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Purbalingga bersinergi dengan Lembaga-lembaga terkait, antara lain Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Partai Politik, dan organisasi-organisasi kemasyarakatan maupun Lembaga Pendidikan yang mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan politik dengan sasaran pemilih pemula;

3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Indikator kinerja dari program ini adalah Prosentase Ormas yang Terbina. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan menunjang pencapaian Tujuan dan Sasaran 1 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga. Dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga memberikan fasilitasi, pembinaan, serta pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan yang ada di wilayah Kabupaten Purbalingga;

4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Indikator kinerja dari program ini adalah cakupan masyarakat yang memperoleh pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya menunjang pencapaian Tujuan dan Sasaran 1 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Purbalingga. Dalam pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Purbalingga bersinergi dengan Lembaga-lembaga terkait, antara lain Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga, dan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Kabupaten Purbalingga dalam upaya pencegahan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba serta penyuluhan HIV/AIDS;

5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Indikator kinerja dari program ini adalah Jumlah Potensi Konflik yang Terpantau di Kabupaten Purbalingga. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial menunjang pencapaian Tujuan dan Sasaran 1 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga. Dalam pelaksanaan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dan Program Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menjalin koordinasi yang baik dengan TNI/Polri serta organisasi kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Purbalingga mampu menjaga kondisi Kabupaten Purbalingga aman dan kondusif;

Disamping keberhasilan pelaksanaan program, masih ada kekurangan dan kendala yaitu pelaksanaan program/kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga masih dominan menggunakan metode sosialisasi. Tentu hal ini merupakan cara lamban yang dilakukan pemerintah, mengenai model sosialisasi yang cenderung hanya sebagian orang mendapatkan informasi mengenai pendidikan politik, ideologi Pancasila, maupun wawasan kebangsaan. Perlu ada keseimbangan informasi yang modern yang dimana menggunakan teknologi sesuai kebutuhan masyarakat generasi muda saat ini, sehingga informasi mampu tersampaikan keseluruh kalangan generasi muda serta masyarakat umum. Pelaksanaan program tentu didukung dengan adanya sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang tersebut. Namun sumber daya yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Purbalingga masih belum mampu maksimal dalam menjalankan program, dilihat dari minimnya kuantitas maupun kualitas SDM yang membidangi bidang tersebut.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi APIP

Berdasarkan evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2023, APIP merekomendasikan untuk :

5) Komponen Perencanaan Kinerja

Memerintahkan seluruh pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga agar menyusun Perjanjian Kinerja bulanan dan laporan capaian kinerja bulanan pada aplikasi e-kinerja secara tertib dan tepat waktu serta selaras dengan atasan;

6) Komponen Pengukuran Kinerja.

- a. Melaksanakan sekaligus memerintahkan kepada pejabat untuk melakukan verifikasi atasan pada mekanisme pengukuran kinerja pada aplikasi e-kinerja;
- b. Berkoordinasi dengan instansi terkait (bagian Organisasi Setda) untuk mendorong pembuatan dan penggunaan aplikasi e-sakip kabupaten yang digunakan untuk pengumpulan data dan pengukuran capaian kinerja;
- c. Memanfaatkan aplikasi e-Kinerja lebih optimal;
- d. Meningkatkan pengendalian terhadap pengukuran kinerja pegawai, terutama keselarasan SKP antar lini vertikal.

3. Komponen Pelaporan Kinerja.

- a. Melakukan perbaikan pada penyusunan LKjIP pada tahun yang akan datang, terutama perbandingan antara realisasi kinerja level OPD dengan realisasi kinerja level Nasional/ Internasional.
- b. Meningkatkan kualitas informasi dalam dokumentasi pembahasan capaian kinerja pada saat menyusun LKjIP tahun berikutnya;
- c. Menyajikan informasi laporan kinerja dalam bentuk apel maupun saat staf meeting.

4. Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Memerintahkan personal untuk mengikuti Bimtek, Workshop, ataupun pelatihan lainnya yang terkait dengan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti sebagai berikut :

Tabel 3.17

**MATRIKS TINDAK LANJUT EVALUASI AKIP
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PURBALINGGA**

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Status / Progres Penyelesaian
1	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga agar direkomendasikan untuk memerintahkan seluruh Pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga agar secara konsisten menyusun perjanjian kinerja bulanan dan laporan capaian kinerja bulanan pada aplikasi e-kinerja, serta melaporkan kinerjanya tepat waktu	a. Membuat Surat Perintah Kepala Badan Kesbangpol Kab. Purbalingga kepada seluruh PNS agar secara konsisten menyusun Perjanjian Kinerja bulanan dan Laporan capaian Kinerja bulanan pada aplikasi e-Kinerja serta melaporkan tepat waktu	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Purbalingga	Telah di sampaikan kepada Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dengan Surat Pengantar Nomor 700/172.1/2023 tanggal 13 April 2023
		b. Print out e-kinerja pegawai		
2	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga agar direkomendasikan untuk menggunakan rencana aksi sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi pencapaian kinerja triwulan	a. Membuat rencana Aksi triwulanan	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Purbalingga	
		b. Membuat surat pernyataan Kepala Badan Kesbangpol Kab. Purbalingga bahwa akan menggunakan rencana aksi sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi pencapaian kinerja triwulanan		
3	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga agar direkomendasikan untuk secara konsisten melakukan pengumpulan data dan pengukuran kinerja sesuai dengan SOP yang berlaku	a. Membuat surat pernyataan Kepala Bakesbangpol bahwa akan secara konsisten melakukan pengumpulan data dan pengukuran kinerja sesuai dengan SOP yang berlaku	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Purbalingga	
		b. Membuat SOP Pengumpulan Data Kinerja dan penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja		
		c. Membuat SOP Laporan Pengukuran Perjanjian Kinerja dan Evaluasi Kinerja		

4	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga agar direkomendasikan untuk senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan, serta memastikan target-target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai seluruhnya, serta memastikan seluruh Pejabat setara Eselon III dan Pejabat setara Eselon IV untuk senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja pegawai dibawahnya agar target kinerja bulanan pegawai dapat tercapai	Membuat surat pernyataan Kepala Badan, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga untuk senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan, serta memastikan target-target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai seluruhnya, serta senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja pegawai dibawahnya	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Purbalingga
5	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga agar direkomendasikan untuk rekomendasi-rekomendasi yang muncul pada Rapat Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian kinerja untuk didokumentasikan dan dipantau tindak lanjutnya	a. Membuat surat pernyataan Kepala Bakesbangpol agar rekomendasi-rekomendasi yang muncul pada rapat monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian kinerja untuk didokumentasikan dan dipantau tindak lanjutnya	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Purbalingga
		b. Copy Notulen, daftar hadir, undangan, dokumentasi Rapat Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja	
6	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga agar direkomendasikan untuk mendukung penggunaan teknologi informasi (aplikasi) untuk pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja yang dikembangkan oleh unit kerja terkait (Dinas	Membuat surat pernyataan Kepala Badan Kesbangpol Kab. Purbalingga agar mendukung penggunaan teknologi informasi (aplikasi) untuk pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja yang dikembangkan oleh unit kerja terkait (Dinas	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Purbalingga

	Komunikasi dan Informatika)	Komunikasi dan Informatika)		
7	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga agar direkomendasikan untuk secara konsisten menyusun Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memanfaatkan laporan kinerja sebagai bahan dalam menyusun penyesuaian strategi/kebijakan untuk mencapai kinerja berikutnya	Membuat surat pernyataan Kepala Bakesbangpol Kab. Purbalingga untuk secara konsisten menyusun Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memanfaatkan laporan kinerja sebagai bahan dalam menyusun penyesuaian strategi/kebijakan untuk mencapai kinerja berikutnya	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Purbalingga	
8	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga agar direkomendasikan untuk mengoptimalkan peran tim penerapan SAKIP internal untuk melaksanakan evaluasi internal AKIP secara berkala dan berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku	<p>a. Membuat SK Tim Penerapan SAKIP Internal</p> <p>b. Surat Perintah Kepala Badan Kesbangpol Kab. Purbalingga kepada Tim Penerapan SAKIP Internal</p> <p>c. Surat Pernyataan Kepala Badan Kesbangpol Kab. Purbalingga bahwa akan mengoptimalkan peran tim penerapan SAKIP internal untuk melaksanakan evaluasi internal AKIP secara berkala dan berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku</p>	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Purbalingga	
9	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga agar direkomendasikan untuk melakukan evaluasi atas rencana aksi sesuai ketentuan yang berlaku dalam pedoman implementasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Purbalingga	Surat Pernyataan Kepala Badan Kesbangpol Kab. Purbalingga bahwa akan melakukan evaluasi atas rencana aksi sesuai ketentuan yang berlaku dalam pedoman implementasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Purbalingga	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Purbalingga	

10	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga agar direkomendasikan untuk meningkatkan kualitas evaluasi internal dengan melakukan pendalaman yang memadai untuk memperbaiki dan meningkatkan capaian kinerja individu dan organisasi	Surat Pernyataan Kepala Badan Kesbangpol Kab. Purbalingga bahwa akan meningkatkan kualitas evaluasi internal dengan melakukan pendalaman yang memadai untuk memperbaiki dan meningkatkan capaian kinerja individu dan organisasi	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Purbalingga	
11	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga agar direkomendasikan untuk senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi capaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik serta melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan	Surat Pernyataan Kepala Badan Kesbangpol Kab. Purbalingga bahwa akan senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Purbalingga	

BAB IV

PENUTUP

Tinjauan Umum Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga

Sebagai Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga mempunyai tugas pokok yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Dengan memperhatikan pengukuran capaian kinerja organisasi sebagaimana dibahas pada bab sebelumnya, maka secara umum indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 sebagian telah tercapai sesuai target yang direncanakan. Hal tersebut didukung dengan data capaian per indikator kinerja sesuai tabel berikut

Tabel 4.1

Capaian per Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Purbalingga Tahun 2023

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	
Meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai wawasan kebangsaan dan partisipasi politik Masyarakat		Persentase potensi konflik yang diredam tidak menjadi konflik	Persen	95	92,96	97,85	
	Meningkatkan kualitas kelembagaan KESBANGPOL	Nilai SAKIP KESBANGPOL	Indeks	72	73,01	101,4	
	Menurunnya potensi konflik dimasyarakat	Cakupan pencegahan/tangkal dini konflik	Potensi	45	71,00	35	
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang politik dalam negeri		Cakupan pendidikan politik masyarakat	Persen	0,28	0,28	100
			Cakupan pendidikan wawasan kebangsaan	Persen	0,16	0,16	100

Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Menjawab isu strategis yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga seperti yang dijelaskan pada Bab I diatas maka strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga di masa mendatang antara lain:

1. Terkait dengan capaian indikator kinerja tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 yaitu Meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai nilai wawasan kebangsaan dan partisipasi politik Masyarakat, dengan indikator kinerja Persentase potensi konflik yang diredam tidak menjadi konflik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga melaksanakan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang penanganan konflik sosial, wawasan kebangsaan, sosialisasi P4GN, dan pendidikan politik, serta membentuk Desa Pelopor Pancasila di 4 (empat) desa;
2. Terkait pencapaian Kinerja Sasaran
Indikator Kinerja Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 adalah Menurunnya potensi konflik dimasyarakat dengan capaian indikator kinerja Cakupan pencegahan/tangkal dini konflik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga akan memperbanyak sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang penanganan konflik sosial, mendayagunakan satgas P4GN dengan menyusun P4GN, pembinaan dan pengembangan Desa Pelopor Pancasila, Pendidikan dan Pelatihan Intelijen Dasar bagi aparatur pemerintahan desa dan kecamatan, pengembangan Sistim Informasi Kewaspadaan Dini Daerah (SIWASDINDA);
3. Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya peran serta Masyarakat dalam bidang politik dalam negeri dengan 2 (dua) capaian indikator kinerja
 - a. Terkait dengan Cakupan pendidikan politik Masyarakat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga akan mengintensifkan Pendidikan politik kepada pemilih pemula yaitu penduduk usia 16 s.d. 17 tahun dengan rencana awal membuat nota kesepahaman dengan Lembaga Pendidikan Menengah dan melaksanakan apel rutin ke sekolah-sekolah sasaran, serta pemberdayaan organisasi kemasyarakatan;
 - b. Terkait dengan Cakupan Pendidikan Wawasan Kebangsaan akan mengintensifkan Pendidikan wawasan kebangsaan kepada penduduk usia produktif dengan rencana awal membuat nota kesepahaman dengan Lembaga Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi untuk melaksanakan apel rutin ke sekolah-sekolah sasaran, serta pemberdayaan organisasi kemasyarakatan.

Demikian laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga tahun 2023, semoga menjadi motivasi dan melecut kami untuk bekerja keras dimasa mendatang demi memujudkan visi Kabupaten Purbalingga.

Purbalingga, 26 Januari 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURBALINGGA



PANDI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19890717 199101 1 003